



**DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Riza Aditya Syafri\*  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta  
riza.syafri@dpr.go.id

Eleonora Sofilda  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta  
eleonorasofilda@trisakti.ac.id

Agustina Suparyati  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta  
agustina\_suparyati@trisakti.ac.id

\*Alamat Korespondensi: riza.syafri@dpr.go.id

**ABSTRACT**

*The fiscal decentralization policy has been implemented in Indonesia for more than two decades. However, its implementation has not successfully reduced local governments' reliance on transfers from the central government, which has contributed to the low level of financial independence among local governments. This study aims to identify and analyze the determinants of fiscal independence in the regions by using a quantitative approach through panel data regression and using inter-regional comparisons covering western, central, and eastern regions in Indonesia during 2016-2021. The panel data regression analysis shows that the effectiveness of Local Revenue (PAD), Human Development Index (HDI), and investment have a positive effect across all regions. Meanwhile, economic growth and population have a significant effect only in the western and eastern regions of Indonesia. Additionally, central government transfer funds significantly affect the western and central regions of Indonesia. Furthermore, capital expenditure and personnel expenditure have significant effects only in the western region of Indonesia. These findings indicate that there are different characteristics that affect financial independence in each region, so that different policy directions are needed to encourage financial independence in each region.*

*Keywords: Central Government Transfer, Investment, Panel Data Regression, Regional Budget Expenditure, Regional Fiscal Independence*

**ABSTRAK**

Kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Namun implementasinya masih belum dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian keuangan di pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis determinan kemandirian keuangan di daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel serta perbandingan antarregional meliputi wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia selama tahun 2016-2021. Hasil analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan investasi berpengaruh positif pada seluruh kluster penelitian, sementara pertumbuhan ekonomi dan populasi hanya berpengaruh signifikan pada wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, variabel dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan pada wilayah barat dan tengah Indonesia. Selanjutnya, belanja modal dan belanja pegawai hanya berpengaruh signifikan pada wilayah barat Indonesia. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik yang memengaruhi kemandirian keuangan di setiap regional, sehingga diperlukan arah kebijakan yang berbeda untuk mendorong kemandirian keuangan pada masing-masing regional.

Kata kunci: *Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Investasi, Kemandirian Keuangan Daerah, Regresi Data Panel*

KLASIFIKASI JEL: E62, H71, H72, C23

**CARA MENGUTIP:**

Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277-290.

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menandai dimulainya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut dinilai sebagai landasan utama bagi penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, yang secara efektif memberikan pemerintah daerah wewenang, hak dan kewajiban yang luas dalam pembangunan daerah (Ginting et.al., 2019).

Sebagai bentuk desentralisasi keuangan, selain memperoleh hak memungut pendapatan dari potensi daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD), pemerintah daerah juga menerima sejumlah anggaran dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Kewenangan sejumlah urusan pusat yang diberikan kepada daerah tersebut disertai sejumlah pendanaan, yang disebut Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, pemberian TKD juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan baik secara vertikal, maupun secara horizontal.

Melalui alokasi TKD tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerahnya. Percepatan pembangunan dilakukan melalui penyediaan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur dasar, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), maupun pengembangan sektor-sektor unggulan dan sektor potensial di daerahnya. Hal ini akan memberikan *multiplier effect* yang signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian di daerah.

Dengan demikian, keberhasilan praktik desentralisasi fiskal salah satunya dapat tergambarkan dari sejauh mana pengaruh TKD mampu mendorong pembangunan dan perekonomian di daerah, yang terlihat dari peningkatan peranan PAD terhadap total

### PENERAPAN DALAM PRAKTIK

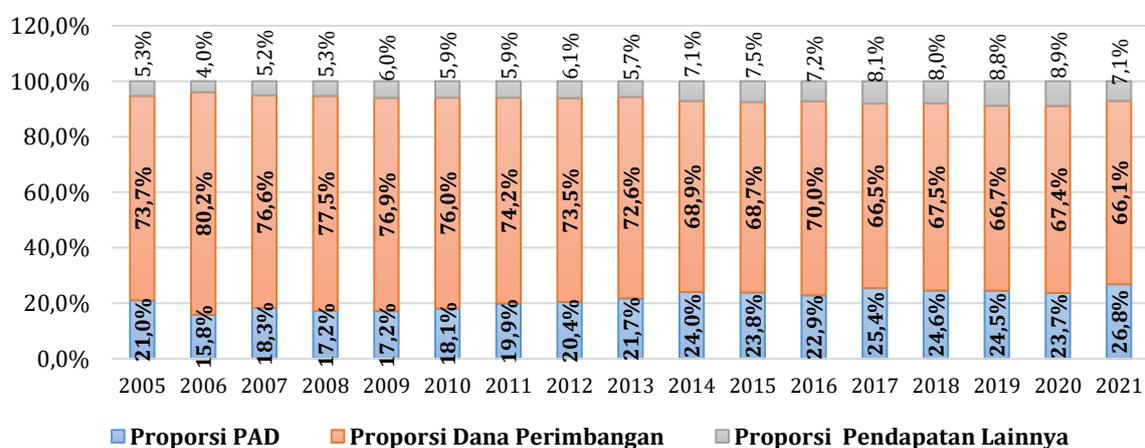
- Perubahan kebijakan transfer ke daerah dengan pembatasan diskresi sesuai tingkat kemandirian keuangan daerah.
- Reklasifikasi sebagian komponen dana bagi hasil menjadi opsen pajak, bagi daerah penghasil.
- Peningkatan kapasitas SDM di daerah.
- Peningkatan dan pemerataan investasi antar daerah.

pendapatan daerah. Peningkatan peranan PAD terhadap total pendapatan daerah juga menggambarkan meningkatnya kemandirian keuangan di daerah, terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar daerahnya.

Kenyataannya, hingga lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, proporsi PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sebaliknya, menurut data yang ada, TKD tetap merupakan komponen utama pada komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2022) yang dihitung secara total (provinsi, kabupaten, dan kota) dari tahun 2005 hingga 2021, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya meningkat sekitar 5,8%, yaitu dari 21% pada tahun 2005, meningkat menjadi 26,8% pada tahun 2021. Sebaliknya, proporsi TKD mengalami penurunan dari 73,7% pada tahun 2005 menjadi 66,1% pada tahun 2021. Namun TKD masih tetap menjadi komponen utama pembentuk APBD di daerah (Grafik 1).

Selain itu, jika dilihat berdasarkan tingkat pemerintahannya, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah di tingkat provinsi telah jauh lebih tinggi dibandingkan pada tingkat kabupaten/kota. Rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tingkat provinsi selama tahun 2005-2021 berada di atas 40%.

Grafik 1 Proporsi Pendapatan Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)



Sumber: DJPK (2022), diolah peneliti.

Sementara pada level kota, rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2005-2021 sekitar 19,7%. Bahkan, pada level kabupaten, rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada periode yang sama hanya sekitar 9,3%. Dari kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pada tingkat kabupaten maupun kota, cenderung lebih membutuhkan upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah, dibandingkan pada tingkat provinsi.

Lebih jauh lagi, jika dilihat berdasarkan pendekatan wilayah, juga terlihat bahwa kabupaten/kota pada wilayah barat Indonesia, secara rata-rata memiliki tingkat kemandirian daerah (proporsi PAD) yang lebih tinggi dibandingkan pada wilayah tengah, maupun wilayah timur Indonesia. Wilayah barat Indonesia, yang mencakup kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Jawa, serta kabupaten/kota di Provinsi Bali, secara rata-rata selama tahun 2005-2021 memiliki proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 27%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di wilayah barat mengalami peningkatan dari rata-rata tahun 2005 sebesar 25%, menjadi 30% pada tahun 2021.

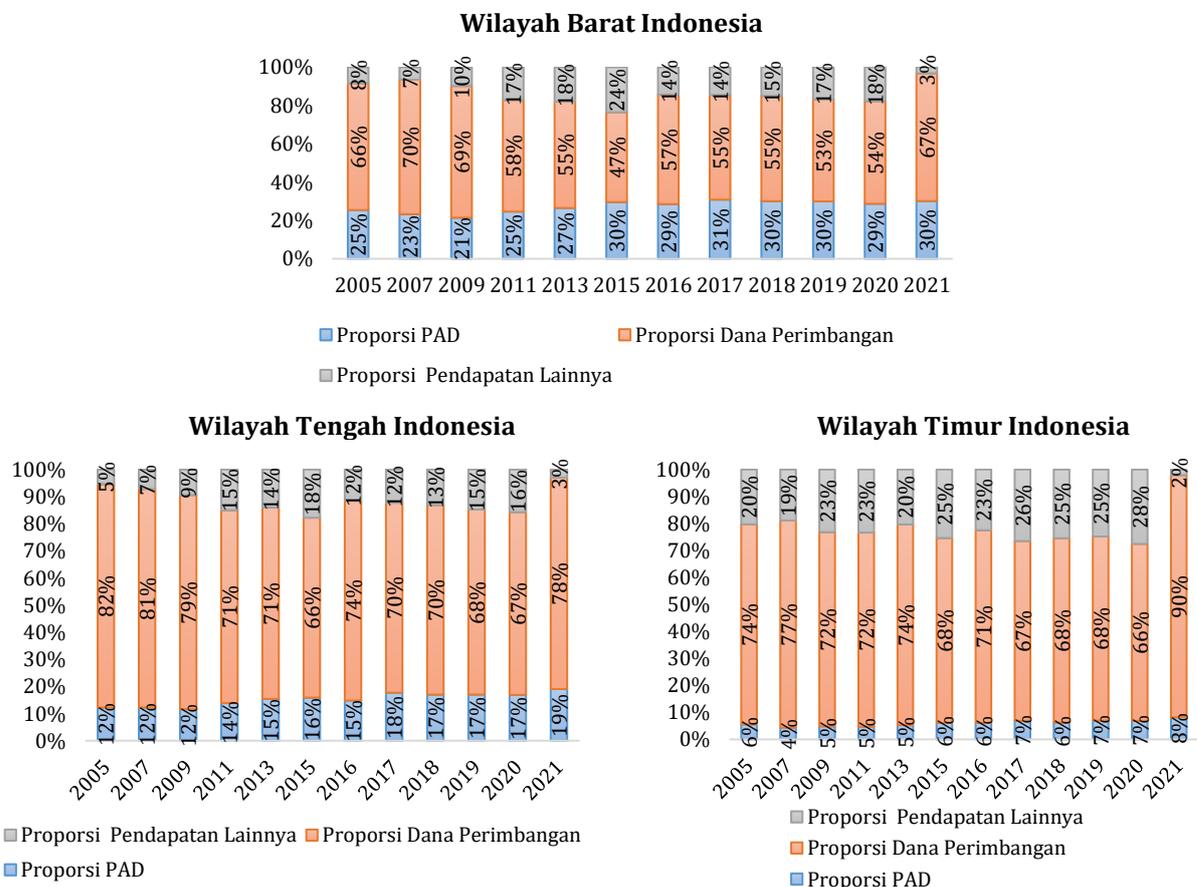
Sedangkan pada wilayah tengah Indonesia, yang meliputi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan,

Sulawesi, dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara rata-rata selama tahun 2005-2021 memiliki proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 15%, dimana terjadi peningkatan proporsi PAD di wilayah ini dari rata-rata sebesar 12% pada tahun 2005, menjadi 19% pada tahun 2021. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di wilayah tengah Indonesia cenderung jauh lebih rendah dibandingkan pada wilayah barat Indonesia.

Sementara pada wilayah timur Indonesia, yang meliputi kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, memiliki rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang lebih rendah. Secara rata-rata selama tahun 2005 - 2021, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di wilayah ini hanya sebesar 6%, dimana pada tahun 2005 proporsi PAD dibandingkan dengan total pendapatan di wilayah ini sebesar 6%, dan hanya meningkat menjadi 8% pada tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan tersebut, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, belum terjadi perkembangan signifikan pada komponen pendapatan asli di daerah, yang tercermin dari masih rendahnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah atau dengan kata lain,

Grafik 2 Perbandingan Struktur APBD Kabupaten/Kota Berdasarkan Regional/Wilayahnya



Sumber: DJPK (2022), diolah.

tingkat kemandirian keuangan di daerah, terutama pada tingkat kabupaten/kota, masih tergolong rendah. Selain itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ketimpangan kondisi PAD antar wilayah di Indonesia. Wilayah barat Indonesia cenderung memiliki proporsi PAD yang lebih besar terhadap APBD dibandingkan pada wilayah tengah dan timur Indonesia. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik dari determinan yang memengaruhi kemandirian keuangan di wilayah barat Indonesia, dengan wilayah tengah dan timur Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di masing-masing daerah. Peneliti meyakini bahwa pada masing-masing regional memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga antara satu variabel dengan variabel lainnya dapat memberikan dampak yang berbeda juga. Adapun variabel yang digunakan dalam studi ini, diantaranya indeks kemandirian keuangan sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen yang digunakan yaitu efektivitas PAD, dana perimbangan, belanja modal, belanja pegawai, investasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, serta jumlah penduduk sebagai variabel-variabel yang diduga memberikan pengaruh terhadap indeks kemandirian keuangan di daerah.

Dengan menganalisis determinan yang berdampak pada otonomi keuangan wilayah, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan untuk dapat mendukung perbaikan implementasi desentralisasi fiskal sehingga dapat mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah di masa yang akan datang. Di samping itu, penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitiannya hanya pada periode tahun 2016 sampai dengan 2021. Penelitian ini mengeluarkan data DKI Jakarta sebagai objek penelitian.

## STUDI LITERATUR

Musgrave & Peacock (2008) mendefinisikan keuangan publik sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian pemerintahan secara umum. Sementara Rosen & Gayer (2008) juga menerangkan bahwa pada keuangan publik berusaha mempelajari bagaimana intervensi pemerintah dalam mengatur pasar. Ruang lingkup kebijakan publik menurut Suparmoko (2019) terdiri dari administrasi negara, penerimaan negara, pengeluaran negara, stabilisasi dan pertumbuhan, serta pengaruh keuangan publik terhadap perekonomian.

Dengan melihat definisi dan ruang lingkup keuangan publik di atas, dapat tergambarkan bahwa salah satu tujuan dari keuangan publik yaitu untuk memengaruhi jalannya perekonomian melalui intervensi pemerintah dalam bidang

anggaran dan belanja negara, atau lebih tepatnya kebijakan fiskal (Soediyono, 2005). Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yang secara konsep memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Salah satu teori desentralisasi dijelaskan dalam Tiebout *Hypotesis* pada tahun 1956, yang beranggapan bahwa pemerintah daerah akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menyediakan barang dan jasa publik. Penyediaan barang publik oleh pemerintah lokal dapat mengatasi masalah kemajemukan antar daerah yang beragam, sehingga dapat menyelesaikan masalah inefisiensi dalam penyediaan barang publik di daerah (Michael, 2008).

Oates (1999) mengungkapkan beberapa pandangan yang mendukung penyediaan pelayanan publik melalui pemerintah daerah, diantaranya: (a) pemerintah daerah dianggap memiliki pemahaman tertinggi mengenai karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal; (b) penyediaan pelayanan publik melalui pemerintah daerah dapat bekerja lebih cepat dan lebih efektif; (c) serta dapat mendorong terjadinya inovasi pelayanan publik antar pemerintah daerah.

Salah satu ukuran dari suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat terlihat dari terciptanya kemandirian keuangan pada pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat terlihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio PAD yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar di wilayah tersebut (DJPK, 2011). Sebaliknya, semakin tinggi rasio transfer terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah tingkat kemandirian daerah. (DJPK, 2011).

Halim (2004) menyatakan bahwa hubungan dan pelaksanaan otonomi antara pemerintah pusat dan lokal berbeda-beda tergantung pada tingkat kemandirian keuangan masing-masing daerah menjadi pola hubungan yang mendidik, konsultatif, partisipasi, dan delegasi. Bagi daerah dengan derajat kemandirian keuangan yang sangat rendah (0 - 25%) dapat diberlakukan pola hubungan yang instruktif. Sedangkan pada daerah dengan derajat kemandirian yang rendah (25 - 50%) dapat diberlakukan pola hubungan yang konsultif. Pada daerah dengan tingkat kemandirian yang sedang (50 - 75%) dan tinggi (75 - 100%) dapat diberikan pola hubungan partisipatif dan delegatif. Dengan demikian, kewenangan otonomi yang diberikan pada pemerintah daerah, dibatasi berdasarkan tingkat kemandirian pada masing-masing daerah.

Untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan di daerah, perlu diidentifikasi dan dianalisis mengenai elemen yang memengaruhi

otonomi keuangan pemerintah daerah. Studi sebelumnya telah mencoba menganalisis determinan dari kemandirian keuangan di daerah. Beberapa penelitian tersebut diantaranya Ernawati & Riharjo (2017), Haptari et al. (2022), Riyadi (2022), Rofiq & Arza. (2021), dan Ginting et al. (2019).

Berdasarkan penelitian Ernawati & Riharjo (2017) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja PAD dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ditemukan bahwa kinerja PAD dan belanja modal berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota. Selanjutnya, penelitian Haptari et al. (2022) menganalisis strategi untuk meningkatkan PAD melalui penguatan independensi keuangan di seluruh kabupaten/kota. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa PAD membantu kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan positif. Sementara transfer dari pemerintah pusat berkontribusi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan provinsi, khususnya untuk variabel belanja langsung dan tidak langsung.

Penelitian Riyadi (2022) menyelidiki hubungan antara tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU dan DAK berdampak negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara belanja modal berdampak positif dan signifikan.

Studi Rofiq & Arza (2021) juga menyelidiki hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan jumlah penduduk. Penemuannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan.

Mirsan et al. (2019) melakukan penelitian tentang bagaimana investasi dan PAD berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan di Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Terakhir, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al. (2019), pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian daerah secara keseluruhan pada tahun 2013–2018, didapati hasil bahwa dana perimbangan dan jumlah penduduk berpengaruh positif pada satu *cluster* penelitiannya. Sementara variabel kapasitas sumber daya manusia memberi dampak positif dan signifikan dengan tingkat kepercayaan 90%, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada seluruh kelompok penelitian pada salah satu *cluster* penelitiannya.

Berdasarkan beberapa kajian literatur sebelumnya, didapati hasil bahwa dana perimbangan atau transfer ke daerah berpengaruh negatif pada kemandirian keuangan daerah. Ini tidak sejalan dengan Tiebout *Hypotesis* dan teori Oates (1999), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi di daerahnya, sehingga dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat terjadinya pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Teori tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al. (2019), yang menemukan bahwa dana perimbangan memiliki efek positif dan signifikan pada salah satu subyek penelitian mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dan menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan/transfer ke daerah, belanja modal, belanja pegawai, investasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota. Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini, merujuk pada teori dan penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

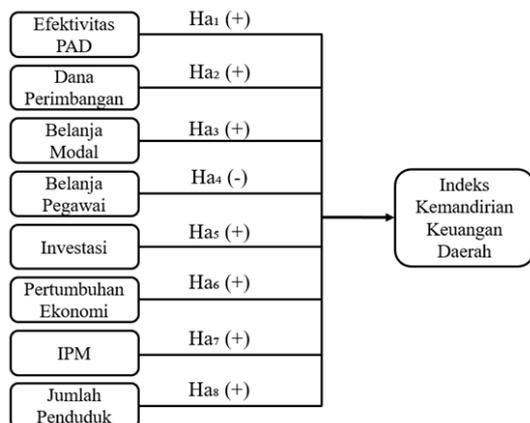
- H1: PAD diduga berdampak positif secara signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H2: Dana perimbangan diduga berdampak positif secara signifikan pada tingkat kemandirian finansial provinsi.
- H3: Belanja modal berkontribusi secara signifikan dan positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H4: Belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kemandirian keuangan wilayah.
- H5: Investasi berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H6: Pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H7: Kualitas SDM (IPM) berdampak positif dan signifikan dalam hal tingkat kemandirian keuangan wilayah.
- H8: Jumlah penduduk berdampak positif dan signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Atas hipotesis serta uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, Gambar 1 menunjukkan desain kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian hipotesis atas variabel-variabel yang diduga memengaruhi tingkat kemandirian keuangan di daerah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, meliputi 508 pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah peneliti

Selain itu, studi ini juga berusaha untuk melihat perbedaan karakteristik yang memengaruhi kemandirian daerah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penelitian ini mencoba untuk mengkategorikan objek penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan wilayah.

Pembagian wilayah yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pembagian wilayah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPPN/Bappenas). Pengelompokan (kluster) yang digunakan pada penelitian ini, seperti yang disajikan dalam Tabel 1.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dalam menjelaskan perkembangan dan kondisi dari masing-masing variabel. Selanjutnya, penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga

Tabel 1 Kluster Data Penelitian

No.	Kluster	Wilayah
1.	Regional I: Wilayah di barat Indonesia	Meliputi kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan kabupaten/kota pada Provinsi Bali (276 kabupaten/kota).
2.	Regional II: Wilayah di tengah Indonesia	Meliputi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (147 kabupaten/kota).
3.	Regional III: Wilayah di timur Indonesia	Meliputi kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (85 kabupaten/kota).

Sumber: Bappenas (2022), diolah peneliti.

membandingkan kondisi kemandirian keuangan daerah dan variabel-variabel yang memengaruhinya, pada satu regional dengan regional lainnya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk digunakan, diperlukan uji spesifikasi model untuk menentukan apakah itu model efek tetap (*fixed effect model/FEM*), model efek acak (*random effect model/REM*), atau model regresi linier berganda biasa (*common effect model/CEM*). Studi ini menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menguji spesifikasi model.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dan mengubah model studi yang dilakukan oleh Ginting, *et. al* (2019), dimana pada penelitian tersebut menggunakan dana perimbangan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, dan jumlah pengangguran sebagai determinan yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah dengan pembagian kluster berdasarkan tingkat kemandirian daerah. Sementara pada penelitian ini, menghilangkan variabel jumlah pengangguran, serta menambah beberapa variabel independen lain seperti efektivitas PAD, belanja modal, belanja pegawai, serta investasi. Selain itu, pembagian kluster pada penelitian ini juga diubah berdasarkan wilayah/regional daerah sehingga persamaan model penelitiannya adalah sebagaimana Persamaan 1.

$$IKF_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Ln}X_{2it} + \beta_3 \text{Ln}X_{3it} + \beta_4 \text{Ln}X_{4it} + \beta_5 \text{Ln}X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \beta_8 \text{Ln}X_{8it} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

IKF<sub>it</sub> = Indeks Kemandirian Keuangan daerah

X<sub>1it</sub> = Efektivitas PAD (Target PAD/Realisasi PAD)

X<sub>2it</sub> = Dana Perimbangan Kabupaten/Kota

X<sub>3it</sub> = Jumlah Belanja Modal

X<sub>4it</sub> = Jumlah Belanja Pegawai

X<sub>5it</sub> = Jumlah Investasi (PMA dan PMDN)

X<sub>6it</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>7it</sub> = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X<sub>8it</sub> = Jumlah Penduduk

e<sub>it</sub> = Error

α = Konstanta

β = Koefisien regresi yang akan di estimasi

i = Kabupaten/Kota yang akan diobservasi

t = Periode observasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini disajikan dengan pembagian berdasarkan tiga regional, yaitu Regional I yang

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian (Regional I)

Variabel	Jumlah Observasi	Nilai Rata-Rata	Standar Deviasi	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Indeks Kemandirian Fiskal Keuangan (%)	1.656	14,87	11,24	84,47	1,14
Efektivitas PAD (%)	1.656	105	27,4	462	21
Dana Perimbangan (Rp)	1.656	Rp1,19 triliun	Rp1,07 triliun	Rp19 triliun	Rp392 miliar
Belanja Modal (Rp)	1.656	Rp370 miliar	Rp655 miliar	Rp14,1 triliun	Rp32,7 miliar
Belanja Pegawai (Rp)	1.656	Rp796 miliar	Rp1.24 triliun	Rp2,2 triliun	Rp141 miliar
Investasi (Rp)	1.656	Rp2,02 triliun	Rp7.38 triliun	Rp119 triliun	Rp0.00
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1.656	3,67	2,94	23,5	-16,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1.656	70,89	5,04	87,18	58,27
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.656	767 ribu	945 ribu	10,64 juta	33,6 ribu

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian (Regional II)

Variabel	Jumlah Observasi	Nilai Rata-Rata	Standar Deviasi	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Indeks Kemandirian Keuangan (%)	882	9,21	5,79	42,97	0,79
Efektivitas PAD (%)	882	113,3	49,5	597,2	26,08
Dana Perimbangan (Rp)	882	Rp924 miliar	Rp371 miliar	Rp4,35 triliun	Rp402 miliar
Belanja Modal (Rp)	882	Rp279 miliar	Rp151 miliar	Rp1,29 triliun	Rp71 miliar
Belanja Pegawai (Rp)	882	Rp460 miliar	Rp217 miliar	Rp1,94 triliun	Rp84,2 miliar
Investasi (Rp)	882	Rp963 miliar	Rp2,26 triliun	Rp28,1 triliun	Rp0
Pertumbuhan Ekonomi (%)	882	4,43	5,41	112,2	-34,57
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	882	69,24	4,50	84,15	60,87
Jumlah Penduduk (Jiwa)	882	278 ribu	217 ribu	1,54 juta	23 ribu

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 4 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian (Regional III)

Variabel	Jumlah Observasi	Nilai Rata-Rata	Standar Deviasi	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Indeks Kemandirian Keuangan (%)	510	4,99	4,02	24,75	0,14
Efektivitas PAD (%)	510	118,7	120,2	1644	7,1
Dana Perimbangan (Rp)	510	Rp833 miliar	Rp254 miliar	Rp2,66 triliun	Rp427 miliar
Belanja Modal	510	Rp240 miliar	Rp122 miliar	Rp1,31 triliun	Rp45,5 miliar
Belanja Pegawai	510	Rp314 miliar	Rp130 miliar	Rp1,07 triliun	Rp69,4 miliar
Investasi	510	Rp530 miliar	Rp2,44 triliun	Rp28,2 triliun	Rp0
Pertumbuhan Ekonomi (%)	510	4,4	8,06	162	-38,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	510	61,65	8,77	81,23	26,56
Jumlah Penduduk (Jiwa)	510	151 ribu	106 ribu	479 ribu	13,7 ribu

Sumber: Diolah peneliti

disajikan pada Tabel 2, Regional II yang disajikan pada Tabel 3, dan Regional III yang disajikan pada Tabel 4. Tabel-tabel tersebut memuat informasi mengenai jumlah observasi, rata-rata, simpangan baku, serta nilai minimum dan maksimum untuk setiap variabel. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik masing-masing variabel di setiap regional yang menjadi perhatian dalam penelitian.

Model regresi data panel yang optimal untuk setiap wilayah penelitian diketahui dengan

menggunakan uji spesifikasi model seperti uji *Chow* dan uji *Hausman*, serta uji *Lagrange multiplier*. Tabel 5 menunjukkan ringkasan hasil pengujian spesifikasi model yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengujian spesifikasi model yang dilakukan, diperoleh hasil jika model pada regional I dan regional II dapat menggunakan *fixed effect model* (FEM) sebagai model terbaik. Sementara pada regional III, dapat menggunakan *random effect model* (REM) sebagai model terbaik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, selanjutnya

Tabel 5 Uji Spesifikasi Model Terbaik Bagi Masing-Masing Regional Penelitian

Pengujian	Model Regional I	Model Regional II	Model Regional III
Uji Chow	FEM	FEM	FEM
Uji Hausman	FEM	FEM	REM
Uji Lagrange Multiplier	-	-	REM
Hasil Akhir	FEM	FEM	REM

Sumber: Diolah peneliti

dapat dilakukan regresi data panel, dengan menggunakan model yang telah terpilih berdasarkan Tabel 5. Hasil regresi data panel terhadap determinan yang memengaruhi independensi keuangan daerah pada ketiga regional, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 6.

Berdasarkan hasil regresi data panel yang ditunjukkan dalam Tabel 6, didapatkan hasil bahwa efektivitas PAD memiliki efek positif dan besar pada tingkat kemandirian keuangan wilayah pada ketiga regional. Hal tersebut berarti bahwa semakin efektif daerah dalam memungut PAD nya, maka akan semakin meningkatkan kemandirian keuangan lokal. Kemudian pada variabel dana perimbangan, didapatkan hasil bahwa dana perimbangan memengaruhi kemandirian keuangan daerah di regional I dan regional II secara negatif dan signifikan. Sedangkan pada regional III, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat independensi keuangan daerah.

Kemudian pada variabel belanja daerah, di regional I, belanja modal berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tetapi tidak signifikan di regional II dan III. Di sisi lain, belanja pegawai berdampak negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada regional I, sementara pada regional II dan III tidak berdampak signifikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta kualitas SDM yang berkualitas yang diproxy melalui IPM, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada ketiga regional. Hal tersebut berarti, semakin tinggi investasi serta IPM, maka tingkat kemandirian keuangan provinsi meningkat.

Variabel pertumbuhan ekonomi dan populasi, memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah pada regional I dan regional III. Sementara pada regional II, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berdampak signifikan pada tingkat kemandirian keuangan di daerah.

### Pembahasan

#### Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada ketiga regional penelitian, pengujian telah menunjukkan bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasilnya sejalan dengan studi oleh Wahyuni & Ardini (2018), dan Nabila & Trisnawati (2017)-yang juga menjelaskan hasil yang serupa, dimana efektivitas PAD memiliki efek positif dan signifikan pada indeks kemandirian keuangan daerah yang dijadikan observasi.

Semakin dekat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan semakin efektif kinerja daerah tersebut dalam memungut PAD nya. Semakin efektif kinerja daerah dalam memungut PAD nya, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pada PAD di daerah tersebut. Dengan demikian akan meningkatkan kemandirian keuangan wilayah.

Tabel 6 Hasil Regresi terhadap Determinan Indeks Kemandirian Fiskal

Variabel	Model Regional I		Model Regional II		Model Regional III	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	14,42694	0,3475	71,75632	0,0000	-40,20332	0,0228
Efektivitas PAD	3,546478	0,0000*	2,189800	0,0000*	0,218856	0,0355*
Dana Perimbangan	-3,811952	0,0000*	-4,733287	0,0000*	-0,755100	0,2905
Belanja Modal	-0,283767	0,0091*	0,013428	0,9269	0,410563	0,1470
Belanja Pegawai	-0,701720	0,0458*	0,317658	0,4523	0,697238	0,2599
Investasi	0,014467	0,0042*	0,027713	0,0006*	0,027545	0,0026*
Pertumbuhan Ekonomi	0,025865	0,0297*	0,017138	0,0951	0,052787	0,0000*
IPM	0,746455	0,0000*	0,863859	0,0000*	0,200239	0,0000*
Jumlah Penduduk	5,754429	0,0000*	-0,349938	0,7203	2,012198	0,0000*
Adjusted R <sup>2</sup>	0,976153		0,935607		0,295981	
F-Statistik	240,3864		84,12079		27,74895	
Prob. F-Statistik	0,000000		0,000000		0,000000	
Jumlah Observasi	1656		882		510	
Jumlah Kabupaten/Kota	276		147		85	

\*Signifikan pada  $\alpha$  5%.

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat dilihat perbedaan karakteristik efektivitas PAD antar regional. Pada regional I (wilayah barat), nilai koefisien regresi efektivitas PAD cenderung lebih besar dibandingkan regional II (wilayah tengah) dan regional III (wilayah timur). Hal ini dapat disebabkan oleh sebaran data efektivitas PAD pada kabupaten/kota di masing-masing regional. Pada regional I, rata-rata tertinggi efektivitas PAD kabupaten/kotanya selama tahun 2016 – 2021 sebesar 146,8%. Sementara rata-rata terendahnya yakni sebesar 52,9%.

Sementara itu, pada regional II rata-rata tertinggi efektivitas PAD kabupaten/kotanya sebesar 242,5%, dengan rata-rata terendahnya sebesar 54,5%. Lebih lanjut lagi, pada regional III rata-rata tertinggi efektivitas PAD kabupaten/kotanya sebesar 640,3%, dengan rata-rata terendahnya sebesar 39,6%. Dari data-data tersebut memperlihatkan bahwa pada regional II dan regional III cenderung memiliki rata-rata efektivitas PAD yang sangat jauh dari targetnya, baik jauh lebih tinggi maupun lebih rendah.

Nilai optimum efektivitas yaitu 100%. Semakin jauh nilai efektivitas PAD dari angka 100% mengindikasikan adanya *gap* antara proses perencanaan di daerah dengan praktik di lapangan. Artinya, daerah-daerah dengan nilai efektivitas PAD yang terlampaui jauh dari target menggambarkan belum optimalnya proses perencanaan di daerah tersebut, sehingga belum mampu memetakan dan menilai potensi serta tantangan yang ada di daerah terkait dengan PAD di daerahnya sehingga, hal ini menyebabkan nilai koefisien regresi pada efektivitas PAD di regional III jauh lebih rendah dibandingkan kedua regional lainnya.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Pengujian menunjukkan bahwa dana perimbangan berdampak negatif dan signifikan pada regional I dan II. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Haptari et al. (2022), Saleh (2020), Wasil et al. (2020), dan Andriani & Wahid (2018), yang juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu bahwa indeks kemandirian keuangan daerah yang menjadi perhatian telah mengalami dampak negatif dan signifikan dari dana perimbangan. Di sisi lain, dana perimbangan tidak memiliki dampak yang signifikan pada regional III.

Hasil pengujian tidak konsisten dengan hipotesis yang diajukan, dimana seharusnya dana perimbangan dapat mendorong peningkatan kemandirian keuangan di daerah. Belum mampunya dana perimbangan dalam mendorong peningkatan kemandirian keuangan di daerah dapat disebabkan juga karena dengan adanya dana perimbangan, pemerintah daerah cenderung berfokus terhadap aspek belanja daerah (cara untuk menghabiskan anggaran yang dimilikinya),

ketimbang mengembangkan/mengeksplorasi potensi yang dimiliki daerah (Saleh, 2020).

Selain itu, alokasi anggaran pada pemerintah daerah juga cenderung bergantung pada politik anggaran kepala daerahnya. Kepala daerah umumnya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat populis untuk meningkatkan elektabilitasnya. Kebijakan-kebijakan populis umumnya lebih bersifat sementara dan jangka pendek, dibandingkan kebijakan pembangunan dan pengembangan potensi PAD di daerah yang dapat bersifat jangka panjang. Oleh karenanya, dana perimbangan justru tidak memberikan dampak signifikan untuk tingkat kemandirian lokal, atau bahkan berdampak negatif padanya.

Sedangkan pada regional II, pengaruh negatif dana perimbangan dengan tingkat kemandirian lokal mungkin berhubungan dengan sektor penggerak perekonomian yang ada di regional II. Pada daerah-daerah regional II umumnya bertumpu pada sektor alam serta pertambangan dan penggalian. Pada sektor-sektor tersebut, kegiatan serta aktivitas perekonomian terjadi di daerah, namun pendapatannya dipungut oleh pemerintah pusat, baru selanjutnya dibagikan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, pada daerah-daerah dengan sektor perekonomian seperti ini akan terlihat memiliki dana perimbangan (terutama DBH) yang sangat tinggi, sementara PAD nya akan tercatat rendah. Oleh sebab itu, pada regional II ini dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan dibandingkan dengan tingkat kemandirian finansial di daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di regional I. Penemuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2020), Nindita & Rahayu (2018), dan Fitriyani & Suwarno (2021), yang juga menemukan hasil yang serupa: belanja modal berdampak negatif dan signifikan terhadap indeks kemandirian keuangan daerah di regional II dan III.

Belanja modal yang lebih tinggi semestinya dapat mendorong peningkatan terhadap pelayanan publik melalui penyediaan sarana prasarana di daerah. Tersedianya sarana prasarana yang berkualitas dapat mendorong meningkatnya investasi maupun aktivitas ekonomi lokal, yang pada akhirnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan PAD dan kemandirian keuangan daerah.

Namun, apabila belanja modal yang telah dialokasikan dalam bentuk aset tetap tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, ataupun tidak sejalan dengan kebutuhan maupun potensi yang

ada di daerah, maka justru dapat memberikan dampak negatif terhadap APBD. Pembangunan aset tetap tentunya akan menyebabkan munculnya biaya pemeliharaan secara periodik. Ketika aset tetap yang dibangun tidak mampu menghasilkan *multiplier effect* terhadap peningkatan PAD, sementara justru menimbulkan biaya pemeliharaan secara periodik, maka dapat dianggap sebagai pemborosan bagi daerah, sehingga berdampak negatif terhadap tingkat kemandirian di daerah.

Meskipun belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada regional II dan III, namun koefisiennya bernilai positif. Hal tersebut dapat disebabkan karena cukup rendahnya proporsi belanja modal pada regional II dan regional III. Dilihat dari proporsinya, rata-rata belanja modal pada regional II dan regional III selama tahun 2016 – 2021 hanya sebesar 22,5% dan 21,9% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal tersebut kurang dari rata-rata proporsi belanja pegawai yang jika dilihat secara proporsi selama tahun 2016 – 2021 sebesar 36,4% pada regional II dan 28,8% pada regional III terhadap total belanja daerah.

#### **Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil menunjukkan bahwa belanja pegawai berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah I. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Ardini (2018), dan Darwis (2015) yang juga menemukan bahwa belanja pegawai berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah II dan III. Namun, pada regional II dan III, belanja pegawai tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemandirian.

Belanja pegawai dapat dikategorikan sebagai belanja rutin, serta belanja yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan aktivitas perekonomian maupun peningkatan kapasitas produksi di daerah. Meskipun demikian, komponen belanja pegawai justru menjadi komponen dengan proporsi paling besar terhadap total belanja daerah. Pada regional I, rata-rata proporsi belanja pegawai selama tahun 2016 – 2021 sebesar 39,89% terhadap total belanja daerah. Sedangkan pada regional II dan III, rata-rata proporsi belanja pegawai sebesar 36,4% dan 28,86% terhadap total belanja daerah.

Ketika komponen belanja yang bersifat rutin serta tidak langsung memiliki proporsi terbesar terhadap total belanja di daerah, maka ruang fiskal di daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja yang bersifat produktif akan menjadi terbatas. Hal tersebut akan memengaruhi perkembangan PAD di daerah, sehingga belanja pegawai tidak berpengaruh, atau bahkan memberikan pengaruh

yang negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan di daerah.

#### **Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Penelitian ini menemukan bahwa investasi berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di ketiga regional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mirsan et al. (2019) yang menemukan bahwa investasi berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Investasi akan mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian (Sukirno, 2011). Dengan meningkatnya investasi akan meningkatkan potensi penerimaan di daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah. Namun, jika dilihat dari nilai koefisien regresi pada model penelitian yang dihasilkan, terlihat bahwa meskipun berpengaruh signifikan, nilai koefisien regresinya sangat rendah. Artinya, dalam model penelitian yang dihasilkan, kemampuan investasi dalam memengaruhi tingkat kemandirian keuangan di daerah relatif lebih rendah dibandingkan beberapa variabel lainnya.

Beberapa faktor dapat mengakibatkan rendahnya koefisien regresi pada variabel investasi. Dilihat dari sebaran data investasi pada kabupaten/kota, terlihat bahwa masih banyak ditemukan kabupaten/kota yang memiliki nilai investasi Rp0, baik di bagian timur, tengah, dan barat Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari fluktuasi nilainya, terlihat bahwa cenderung terjadi fluktuasi nilai yang cukup tinggi pada investasi di kabupaten/kota dari tahun ke tahun. Kedua faktor tersebut dapat menjadi penyebab meskipun variabel investasi berpengaruh signifikan, tetapi memiliki koefisien regresi yang rendah.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Studi ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di regional I dan III. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al. (2019), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di regional II, III, dan IV penelitiannya, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di regional I penelitiannya.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan total jumlah barang dan jasa (Sukirno, 2011). Peningkatan aktivitas perekonomian juga akan meningkatkan potensi penerimaan bagi suatu daerah, sehingga akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan kabupaten/kota pada regional II, sebenarnya, secara umum memiliki pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 4,4% selama tahun 2016 – 2021, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada regional I yang hanya 3,68% pada periode yang sama. Namun, pada regional II justru pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan (atau hanya berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 90%). Hal tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik sektor perekonomian yang menopang regional II.

Pada regional II yang cenderung ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, pengakuan pendapatannya tidak langsung diterima dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah, melainkan ditarik oleh pemerintah pusat, yang kemudian di distribusikan ke daerah melalui transfer ke daerah sehingga ketika terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan PDRB di daerah meningkat, hal tersebut tidak akan langsung berdampak terhadap peningkatan PAD di daerah.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di ketiga regional. Studi Ginting et al. (2019) menemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan tingkat keyakinan 90%.

Ketika terjadi peningkatan kualitas SDM di suatu daerah, maka hal ini dapat berpotensi mendorong terjadinya inovasi dan peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong terjadinya perbaikan dalam proses pemerintahan di daerah, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jadi, sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu meningkatkan PAD daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada regional I dan III. Penemuan ini sejalan dengan hasil studi oleh Ginting et al. (2019), Rofiq & Arza (2021), dan Anwar (2019). Studi sebelumnya juga menemukan bahwa jumlah penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap indeks kemandirian keuangan daerah. Namun, jumlah penduduk tidak memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah di regional II.

Peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di suatu wilayah melalui peningkatan *supply-demand* atas barang dan jasa. Jika aktivitas ekonomi di suatu daerah meningkat, maka pajak daerah, retribusi

daerah, dan penerimaan lainnya dapat meningkatkan PAD pemerintah daerah.

Sementara pada regional II, jumlah penduduk tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Ini mungkin karena masih rendahnya jumlah penduduk di regional II, dibandingkan dengan luas wilayahnya. Regional II menjadi wilayah yang memiliki luas paling besar dibandingkan regional I maupun regional III.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga regional, efektivitas PAD, investasi, dan IPM memberi dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada regional I dan regional III, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi tidak signifikan pada regional II. Sebaliknya, dana perimbangan berdampak negatif dan signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah di regional I dan II, sedangkan pada regional III, dampaknya tidak signifikan.

Secara keseluruhan berdasarkan temuan dari tes yang dilakukan, memperlihatkan bahwa masing-masing regional memiliki karakteristik yang berbeda. Hal tersebut terlihat dari perbedaan dampak yang dihasilkan pada masing-masing variabel terhadap tingkat kemandirian regional masing-masing. Karena itu, perlakuan kebijakan terkait otonomi daerah dan desentralisasi fiskal hendaknya dilakukan dengan cara yang berbeda antara regional, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah.

Pada variabel efektivitas PAD, terkait nilai efektivitas PAD yang jauh dari angka 100% (jauh lebih tinggi ataupun lebih rendah), terutama pada regional tengah dan timur Indonesia, diperlukan perbaikan aparatur pemerintah di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah kedepannya dapat mengukur potensi serta tantangan yang dihadapi daerah dalam memungut PAD, secara lebih akurat, sehingga proses perencanaan dalam menentukan target PAD dapat lebih reliabel. Penetapan target PAD yang jauh lebih tinggi ataupun lebih rendah dari potensi di daerah akan mengakibatkan volatilitas penerimaan PAD bagi pemerintah daerah, yang mana hal tersebut justru dapat menyulitkan daerah dalam menilai potensi sesungguhnya dari PAD di daerahnya, sehingga akan mempengaruhi proses perencanaan maupun pengembangan PAD kedepannya.

Sementara pada variabel dana perimbangan, terkait pengaruh dana perimbangan yang jursu memberikan dampak yang negatif terhadap kemandirian daerah, diperlukan beberapa perubahan dalam regulasi yang mengatur mengenai dana perimbangan tersebut. Pemerintah dapat

mempertimbangkan pemberian dana perimbangan dengan melihat tingkat kemandirian di daerah. Pada daerah-daerah dengan tingkat kemandirian rendah hingga sedang, dapat diterapkan pola desentralisasi yang lebih bersifat instruktif, dengan memperbanyak porsi *specific grant* dalam alokasi dana perimbangan (khususnya DAU). Sementara pada daerah dengan tingkat kemandirian sedang hingga tinggi, dapat lebih diberikan keleluasaan dengan memperbanyak porsi dana perimbangan yang bersifat *block grant*. Dengan demikian, alokasi dana perimbangan dapat termaksimalkan sesuai dengan arah pembangunan dan potensi daerah, sehingga memberikan *multiplier effect* yang lebih baik terhadap kemandirian di daerah. Selain itu, pada daerah-daerah dengan sektor utama perekonomian yang bersumber dari SDA maupun pertambangan dan penggalan, pemerintah dapat menerapkan mekanisme opsen pajak, dibandingkan mekanisme dana bagi hasil. Dengan demikian, besaran PAD di daerah-daerah tersebut akan tercatat sebagaimana mestinya, sehingga perhitungan kemandirian keuangan daerah pada daerah-daerah tersebut dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Selanjutnya pada variabel belanja modal, pemerintah daerah perlu memetakan dan mengkaji terlebih dahulu terhadap potensi daerah yang akan dikembangkan, serta mengukur kesesuaian aset yang akan dibangun dengan kebutuhan dan kapasitas di daerah. Dengan demikian, belanja modal yang dialokasikan dapat benar-benar memberikan dampak positif terhadap pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kualitas dari aset-aset yang dibangun sehingga dapat memiliki umur ekonomis yang wajar sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan pada biaya pemeliharaan kedepannya.

Pada variabel belanja pegawai, terlihat bahwa belanja pegawai memberikan dampak negatif dan signifikan pada regional I, namun memberikan dampak positif walaupun tidak signifikan pada regional II dan regional III. Dengan demikian, terlihat bahwa sebenarnya pada regional II dan regional III, dimana aktivitas ekonomi dari sektor swasta tidak terlalu tinggi, adanya intervensi dari belanja pemerintah sebenarnya berdampak positif walaupun tidak signifikan. Dari kondisi tersebut, pada regional I pemerintah daerah perlu menurunkan belanja pegawai yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian, seperti perjalanan dinas ke luar daerah. Sedangkan pada regional II dan III, perjalanan dinas maupun kegiatan di luar kantor masih cenderung dibutuhkan, selama perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor tersebut dilakukan di wilayahnya, sehingga meningkatkan aktivitas perekonomian di wilayahnya.

Pada variabel investasi, meskipun telah terbukti dapat membantu kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan investasi untuk meningkatkan kemandirian keuangan mereka di masa depan. Pemerintah daerah harus melihat apa yang dapat mereka lakukan, sehingga investasi yang masuk dapat sesuai dengan sektor unggulan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus mengambil perhatian ketersediaan infrastruktur dasar dan kualitas SDM agar dapat menarik investasi di daerahnya. Lebih lanjut lagi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya dapat lebih gencar mendorong masuknya investasi di daerah, dengan melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada investor, mengenai potensi-potensi yang terdapat di daerah.

Sedangkan pada variabel pertumbuhan ekonomi, terutama pada regional II dimana tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak meningkat secara signifikan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, perlu mengembangkan dan melakukan diversifikasi terhadap sektor penopang perekonomiannya. Pengembangan sektor perekonomian baru, selain mengurangi ketergantungan daerah terhadap sumber alam serta pertambangan dan penggalan, juga dapat mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi serta potensi pendapatan lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus melakukan dukungan melalui pemberian insentif pajak, dan berbagai program lainnya yang dapat memudahkan kegiatan usaha, sehingga pengaruh dari Pertumbuhan ekonomi akan berdampak lebih besar pada kemandirian keuangan wilayah tersebut.

Pada variabel IPM terbukti memberikan dampak positif yang signifikan pada kemandirian keuangan daerah di ketiga regional. Artinya, kualitas SDM memang memengaruhi secara positif tingkat kemandirian keuangan di daerah sehingga langkah-langkah dalam peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan SDM di daerah. Pendidikan vokasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya perlu terus dikembangkan dengan menyelaraskan kompetensi yang dihasilkan dunia pendidikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tersebut juga perlu diselaraskan dengan sektor-sektor unggulan di daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas SDM pada sektor-sektor unggulan di daerah.

Sementara pada variabel jumlah penduduk, terbukti pada regional I berkontribusi secara signifikan dan positif pada kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, jika dilihat dari kepadatan penduduknya, terlihat bahwa kepadatan penduduk di regional I sudah cukup tinggi, dimana lebih dari 75% jumlah penduduk terpusat pada regional I. Selain itu, jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya, terlihat pertumbuhan penduduk regional I merupakan yang paling rendah

dibandingkan regional II dan III sehingga tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kesan yang dimiliki penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah adalah dengan mengembangkan kualitas penduduknya. Dengan demikian, diharapkan peranan penduduk dapat mendorong peningkatan terhadap kemandirian keuangan di daerah secara lebih besar lagi.

Adapun pada regional II dan regional III, pemerintah perlu mendorong dan mengembangkan berbagai program yang dapat menciptakan terjadinya transmigrasi dari wilayah barat ke timur Indonesias sehingga wilayah-wilayah yang ada pada regional II dan III yang selama ini belum tereksplorasi secara optimal, dapat lebih dioptimalkan. Selain itu, dengan mendorong terciptanya pemerataan penduduk dari barat ke tengah dan timur Indonesia juga akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tengah dan timur Indonesia, dengan demikian dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah kedepannya.

## REFERENSI

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39.
- Anwar, D. K. (2019). *Determinan tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Bappenas. (2022). *Sistem informasi dan manajemen data dasar regional*. Diakses melalui: <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan>.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 50-73.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107-119.
- DJPK. (2011). *Deskripsi dan analisis APBD 2011*. Jakarta: DJPK.
- DJPK. (2022). *Data anggaran dan realisasi APBD 2005-2021*. Jakarta: DJPK.
- Ernawati & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531-545.
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021, March). Pengaruh PAD, DAU, belanja modal, belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper*, 1(1), 61-69.
- Ginting, A., Hamzah, M., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127.  
<https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Haptari, V.D., Ginting, A.M., Aritonang, F.D. (2022). Strategy for increasing regional original income through strengthening some factors in regional financial independence. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 926-934.
- Nabila, F. K., & Trisnawati R. (2017). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Thesis, Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Michael, H.M. (2008). The tiebout hypothesis 50 years later: Lessons and lingering challenges for metropolitan governance in the 21st century. *Public Administration Review*, 68(1), 97-109.
- Mirsan, M.A., Hamzah N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh investasi, PDRB perkapita dan pendapatan asli daerah terhadap derajat kemandirian fiskal (Studi kasus Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 82-98.
- Musgrave, R., & Peacock, A. (. (2008). *Classic in the theory of public finance*. New York: Macmillan.
- Nindita, N.L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. *Journal of Accounting and Finance*. 2(1), 2018.
- Oates, W. (1999). *An essay on fiscal federalism*. *Journal of Economic Literature*, 37 (3), 1120-1149.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 3(1), 298-314.
- Rofiq, I., & Arza, F.I. (2021). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, belanja pegawai dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 705-719.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance* (8th ed., hlm. 15-25). New York: McGraw-Hill.

- Saleh, R. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111-134.
- Soediyono. (2005). *Ekonomi makro pengantar analisis pendapatan nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukirno, S. (2011). *Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Suparmoko, M. (2019). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Edisi ke-6, hlm. 25-35). Yogyakarta: BPFE.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1-16.
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, 1(2), 99-109.